
ARTIKEL

*Optimalisasi Pengelolaan Galian C Pada Seksi Pengawasan dan Penertiban Di Dinas
Perindustrian Kota Sorong*

Ummu Salmah¹, Rusdi², Makdalena Yermia Thesia²

¹²³Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

Korespondensi : Rusdi (rusdi@um-sorong.ac.id)

ABSTRAK

Pengelolaan Galian C merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pengelolaan Galian C pada Seksi Pengawasan dan Penertiban di Dinas Perindustrian Kota Sorong serta mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi pustaka. Informan penelitian terdiri atas Kepala Dinas, Kepala Seksi, Bendahara Barang, Koordinator Lapangan, dan masyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Galian C telah dilaksanakan melalui pengawasan perusahaan, pemeriksaan dokumen perizinan, pengawasan pengangkutan material, penagihan pajak dan retribusi, serta pembinaan kepada perusahaan. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan anggaran operasional, kerusakan kendaraan dinas, belum tersedianya pos pengawasan dan jembatan timbang, keterlambatan pembayaran pajak oleh perusahaan, serta kondisi jalan dan cuaca yang menghambat pengawasan lapangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan anggaran, penyediaan sarana pendukung, penguatan koordinasi dengan perusahaan, serta peningkatan pengawasan lapangan agar pengelolaan Galian C dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

Kata Kunci : Optimalisasi; Pengelolaan; Galian C; Pengawasan

Abstract

Management of Class C Mining is one of the local government's efforts to supervise and control non-metallic mineral and rock mining activities in accordance with applicable regulations while contributing to Regional Original Revenue (PAD). This study aims to analyze the optimization of Class C Mining management in the Supervision and Enforcement Section of the Sorong City Industry Office and identify the obstacles and solutions in its implementation. This research employed a qualitative approach using observation, in-depth interviews, documentation, and literature study for data collection. The findings indicate that Class C Mining management has been implemented through company supervision, permit inspection, transportation monitoring, tax and retribution collection, and company guidance. However, several obstacles remain, including limited operational budgets, damaged official vehicles, the absence of permanent monitoring posts and weighbridges, delays in tax payments, and poor road and weather conditions. Therefore, increasing operational support, improving facilities, strengthening coordination with companies, and enhancing field supervision are necessary to optimize the management of Class C Mining.

Keywords : Optimization; Class C Mining Management; Supervision

PENDAHULUAN

Kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan atau yang lebih dikenal dengan istilah Galian C merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan daerah. Hasil pertambangan berupa pasir, batu, kerikil, tanah urug, dan material konstruksi lainnya menjadi kebutuhan utama dalam pembangunan jalan, jembatan, gedung, pelabuhan, serta berbagai infrastruktur publik. Selain berperan sebagai penyedia bahan bangunan, kegiatan pertambangan Galian C juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan pajak dan retribusi daerah. Oleh karena itu, pengelolaan Galian C harus dilaksanakan secara efektif agar mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Menurut George R. Terry (2014), pengelolaan merupakan suatu proses yang terdiri atas perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling) untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam konteks pengelolaan Galian C, seluruh fungsi manajemen tersebut harus diterapkan secara terpadu agar proses pengawasan, penertiban, serta pengendalian kegiatan pertambangan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Sondang P. Siagian (2014) menjelaskan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi agar pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai penyimpangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Dalam pengelolaan Galian C, pengawasan menjadi sangat penting untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap perizinan, pembayaran pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan teknis pertambangan. Pendapat tersebut diperkuat oleh Hani Handoko (2017) yang menyatakan bahwa pengawasan merupakan proses menetapkan standar pelaksanaan, mengukur hasil pelaksanaan, membandingkan pelaksanaan dengan standar, menganalisis penyimpangan, dan melakukan tindakan koreksi apabila ditemukan ketidaksesuaian. Dengan demikian, pengawasan yang efektif akan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan, mencegah pelanggaran, serta mendukung tercapainya tujuan organisasi secara optimal. Secara yuridis, pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menegaskan bahwa kegiatan pertambangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keberlanjutan, manfaat, keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan lingkungan hidup. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 mengatur pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, termasuk mekanisme perizinan, pembinaan, pengawasan, serta pengendalian kegiatan pertambangan oleh pemerintah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab melakukan pembinaan, pengawasan, dan penertiban terhadap kegiatan usaha yang menjadi kewenangannya. Di Kota Sorong, tugas tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian melalui Seksi Pengawasan dan Penertiban yang berperan mengawasi kegiatan Galian C, meliputi pemeriksaan dokumen perizinan, pengawasan pengangkutan material hasil tambang, penagihan pajak dan retribusi daerah, serta pembinaan kepada perusahaan agar mematuhi ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan fungsi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan perusahaan sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan beberapa informan di Dinas Perindustrian Kota Sorong, pelaksanaan pengelolaan Galian C masih menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan anggaran operasional menyebabkan kegiatan pengawasan belum berjalan secara maksimal. Selain itu, sarana pendukung seperti kendaraan operasional, pos pengawasan, dan jembatan timbang belum memadai sehingga pengawasan terhadap aktivitas pertambangan belum

optimal. Masih terdapat pula perusahaan yang terlambat melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah yang berdampak pada belum optimalnya penerimaan PAD. Permasalahan tersebut diperparah oleh kondisi geografis menuju lokasi pertambangan yang sering mengalami kerusakan jalan, banjir, dan tanah longsor sehingga menghambat pelaksanaan pengawasan di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dan penertiban belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi pengelolaan Galian C melalui peningkatan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sebagaimana dikemukakan oleh George R. Terry. Dengan dukungan anggaran yang memadai, penyediaan sarana operasional, serta penguatan koordinasi antara pemerintah dan perusahaan, diharapkan pengelolaan Galian C dapat berjalan lebih efektif, meningkatkan kepatuhan perusahaan, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai optimalisasi pengelolaan Galian C pada Seksi Pengawasan dan Penertiban di Dinas Perindustrian Kota Sorong. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena yang terjadi secara sistematis berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan serta menginterpretasikan makna dari informasi yang diperoleh melalui interaksi langsung dengan informan. Penelitian dilaksanakan di Dinas Perindustrian Kota Sorong pada bulan April hingga Mei 2026. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan Galian C. Informan terdiri atas Kepala Dinas Perindustrian Kota Sorong, Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban, Bendahara Barang, Koordinator Lapangan, serta satu orang masyarakat yang berada di sekitar lokasi pengawasan Galian C. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan Galian C di lapangan, wawancara dilakukan kepada seluruh informan menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui pengumpulan dokumen, arsip, laporan kegiatan, foto, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan Galian C. Analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terlebih dahulu dikumpulkan, kemudian dipilih, disederhanakan, dan disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk memudahkan proses interpretasi sebelum akhirnya ditarik kesimpulan berdasarkan pola, hubungan, dan temuan yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan triangulasi waktu dilakukan melalui pengecekan kembali data pada waktu yang berbeda, baik saat kegiatan operasional berlangsung maupun setelah kegiatan selesai, untuk mengetahui konsistensi informasi yang diberikan oleh informan. Melalui penerapan ketiga teknik triangulasi tersebut, diharapkan data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL PENELITIAN

A. Optimalisasi Pengelolaan Galian C Pada Seksi Pengawasan Dan Penertiban Di Dinas Perindustrian Kota Sorong

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perindustrian Kota Sorong dengan fokus pada Optimalisasi Pengelolaan Galian C pada Seksi Pengawasan dan Penertiban. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi,

dan studi pustaka. Informan penelitian terdiri atas Kepala Dinas Perindustrian Kota Sorong, Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban, Bendahara Barang, Koordinator Lapangan, serta masyarakat di sekitar lokasi kegiatan pertambangan Galian C. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga menghasilkan gambaran mengenai kondisi aktual pengelolaan Galian C di Dinas Perindustrian Kota Sorong. Pengelolaan Galian C merupakan salah satu fungsi penting pemerintah daerah dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya mineral bukan logam dan batuan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain berperan sebagai penyedia bahan baku pembangunan, sektor Galian C juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan pajak dan retribusi. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan Galian C tidak hanya diukur dari meningkatnya pendapatan daerah, tetapi juga dari efektivitas pengawasan terhadap aktivitas pertambangan, kepatuhan perusahaan terhadap peraturan, serta kemampuan pemerintah dalam meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.

Seksi Pengawasan dan Penertiban Dinas Perindustrian Kota Sorong memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan Galian C melalui pemeriksaan dokumen perizinan, pengawasan pengangkutan material, penagihan pajak dan retribusi daerah, serta pembinaan kepada perusahaan agar menjalankan kegiatan pertambangan sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan secara berkala melalui inspeksi lapangan, pemeriksaan administrasi perusahaan, koordinasi dengan instansi terkait, serta evaluasi terhadap kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban administrasi dan pembayaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pengelolaan Galian C telah berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengawasan dan Penertiban. Pengawasan dilakukan secara rutin melalui kegiatan monitoring di lokasi pertambangan, pemeriksaan dokumen perizinan, pencatatan hasil produksi berdasarkan nota penjualan, serta penagihan pajak dan retribusi kepada perusahaan. Selain itu, petugas juga memberikan pembinaan kepada perusahaan agar senantiasa mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Kegiatan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan Galian C sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan Galian C belum sepenuhnya optimal. Hambatan utama yang ditemukan di lapangan antara lain keterbatasan anggaran operasional pengawasan, belum tersedianya kendaraan operasional yang memadai untuk menjangkau lokasi pertambangan, kondisi jalan menuju lokasi yang cukup sulit, belum adanya pos pengawasan permanen maupun jembatan timbang, serta masih adanya perusahaan yang terlambat melakukan pembayaran pajak dan retribusi. Kondisi tersebut berdampak pada belum maksimalnya frekuensi pengawasan serta efektivitas. Analisis hasil penelitian dilakukan berdasarkan indikator optimalisasi menurut Michalek, Choudhary, dan Papalambros yang meliputi objective function performance, constraint satisfaction, trade-off balance, sensitivity and robustness, serta feasibility.

1. Objective Function Performance (Kinerja Fungsi Tujuan)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Galian C di Dinas Perindustrian Kota Sorong bertujuan meningkatkan efektivitas pengawasan, kepatuhan perusahaan, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan administrasi, pencatatan hasil produksi, monitoring lapangan, serta penagihan kewajiban perusahaan. Hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan telah berjalan sesuai tugas dan fungsi organisasi, namun belum optimal karena keterbatasan anggaran dan sarana operasional sehingga belum seluruh lokasi pertambangan dapat diawasi secara rutin. Berdasarkan teori optimalisasi Michalek, Choudhary, dan Papalambros, indikator *objective function performance* telah tercapai pada kategori **cukup**, karena tujuan organisasi mulai terwujud tetapi belum maksimal akibat

keterbatasan sumber daya. Temuan ini juga sejalan dengan teori manajemen George R. Terry yang menunjukkan bahwa fungsi pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) telah diterapkan dalam kegiatan pengawasan Galian C.

2. Constraint Satisfaction (Pemenuhan Kendala)

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan, hambatan utama dalam pengelolaan Galian C adalah keterbatasan anggaran operasional pengawasan. Anggaran yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan pelaksanaan pengawasan lapangan, terutama untuk biaya transportasi, operasional kendaraan, dan kegiatan monitoring secara berkala. Koordinator Lapangan menjelaskan bahwa petugas sering menggunakan kendaraan pribadi ketika melaksanakan pengawasan karena kendaraan dinas yang tersedia jumlahnya sangat terbatas dan sebagian sudah mengalami kerusakan. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan menjadi kurang efektif, terutama pada lokasi pertambangan yang memiliki akses jalan cukup sulit. Selain itu, Bendahara Barang menjelaskan bahwa masih terdapat perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan penjualan maupun melakukan pembayaran pajak dan retribusi. Kondisi tersebut berdampak terhadap keterlambatan penerimaan PAD sehingga memerlukan tindak lanjut berupa surat teguran dan koordinasi lanjutan dengan perusahaan. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa beberapa ruas jalan menuju lokasi Galian C mengalami kerusakan akibat aktivitas kendaraan pengangkut material serta faktor cuaca berupa banjir dan tanah longsor. Kondisi tersebut menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pengawasan lapangan. Menurut Michalek, Choudhary, dan Papalambros, suatu sistem dikatakan optimal apabila tetap mampu mencapai tujuan meskipun berada dalam berbagai keterbatasan. Dalam penelitian ini, Dinas Perindustrian Kota Sorong tetap melaksanakan pengawasan walaupun menghadapi keterbatasan anggaran, sarana operasional, dan kondisi geografis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur tetap menjalankan tugas melalui penjadwalan pengawasan secara bergiliran dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Namun demikian, keterbatasan tersebut masih memengaruhi efektivitas pengawasan sehingga belum seluruh perusahaan dapat dipantau secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dukungan anggaran operasional, penambahan kendaraan dinas, serta penyediaan fasilitas pendukung agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan lebih efektif.

3. Trade-off Balance (Keseimbangan Antar Tujuan)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Seksi Pengawasan dan Penertiban Dinas Perindustrian Kota Sorong berupaya menyeimbangkan antara pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), pelaksanaan pengawasan, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Dalam pelaksanaannya, petugas tidak hanya berfokus pada peningkatan penerimaan pajak dan retribusi, tetapi juga melakukan pembinaan kepada perusahaan agar tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas, pengelolaan Galian C tidak semata-mata diarahkan untuk meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga bertujuan menciptakan ketertiban administrasi, meningkatkan kepatuhan perusahaan, serta menjaga keberlangsungan kegiatan pertambangan. Oleh karena itu, pendekatan persuasif melalui pembinaan lebih diutamakan sebelum dilakukan tindakan penertiban terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran. Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas sering kali diperlukan penyesuaian terhadap kondisi di lapangan. Keterbatasan anggaran dan personel menyebabkan prioritas pengawasan diberikan kepada perusahaan yang memiliki aktivitas produksi tinggi atau perusahaan yang terlambat memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan retribusi. Strategi tersebut dilakukan agar sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif. Berdasarkan teori Michalek, Choudhary, dan Papalambros, indikator trade-off balance menekankan pentingnya keseimbangan dalam pencapaian beberapa tujuan organisasi secara bersamaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian Kota Sorong telah berupaya menyeimbangkan fungsi pelayanan, pembinaan, pengawasan, dan peningkatan PAD sesuai dengan kemampuan organisasi. Meskipun

demikian, keterbatasan sumber daya menyebabkan pelaksanaan pengawasan belum dapat menjangkau seluruh perusahaan secara bersamaan sehingga penentuan skala prioritas menjadi langkah yang paling realistis.

4. Sensitivity and Robustness (Kepekaan dan Ketangguhan Sistem)

Berdasarkan hasil penelitian, Seksi Pengawasan dan Penertiban menunjukkan kemampuan beradaptasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi di lapangan. Meskipun menghadapi keterbatasan kendaraan operasional, kondisi jalan yang rusak, serta perubahan cuaca yang sering menghambat kegiatan pengawasan, petugas tetap melaksanakan tugas dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Koordinator Lapangan menjelaskan bahwa pengawasan tetap dilaksanakan melalui penjadwalan ulang kegiatan, koordinasi dengan perusahaan, serta penggunaan kendaraan pribadi apabila kendaraan dinas tidak dapat digunakan. Selain itu, komunikasi antaraparat tetap dilakukan untuk memastikan proses pengawasan berjalan sesuai rencana. Masyarakat sekitar lokasi pertambangan juga menyampaikan bahwa kehadiran petugas pengawasan memberikan dampak positif terhadap ketertiban aktivitas perusahaan. Namun, masyarakat berharap frekuensi pengawasan dapat ditingkatkan sehingga dampak negatif seperti debu, kerusakan jalan, dan gangguan lingkungan dapat diminimalkan. Menurut teori optimalisasi, sistem yang optimal harus mampu bertahan dan menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur Seksi Pengawasan dan Penertiban memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas meskipun dihadapkan pada berbagai hambatan operasional. Kemampuan beradaptasi tersebut menjadi salah satu kekuatan organisasi dalam menjaga keberlangsungan fungsi pengawasan. Akan tetapi, ketangguhan sistem masih perlu didukung melalui peningkatan sarana operasional, anggaran, dan jumlah personel agar kualitas pengawasan semakin baik.

5. Feasibility (Kelayakan Implementasi)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Galian C di Dinas Perindustrian Kota Sorong telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan pengawasan meliputi pemeriksaan dokumen perizinan, pencatatan hasil penjualan material, monitoring pembayaran pajak dan retribusi, serta pembinaan kepada perusahaan. Meskipun demikian, implementasi pengelolaan Galian C belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan. Faktor tersebut meliputi keterbatasan anggaran operasional, minimnya kendaraan dinas, belum tersedianya pos pengawasan permanen maupun jembatan timbang, serta keterlambatan perusahaan dalam memenuhi kewajiban administrasi dan pembayaran pajak. Seluruh informan berpendapat bahwa peningkatan kualitas pengelolaan Galian C memerlukan dukungan pemerintah daerah melalui penambahan anggaran, penyediaan kendaraan operasional yang memadai, peningkatan koordinasi dengan perusahaan, serta penguatan sistem pengawasan lapangan.

Berdasarkan teori Michalek, Choudhary, dan Papalambros, suatu kebijakan dapat dikatakan layak apabila mampu diterapkan secara nyata sesuai dengan kondisi organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan Galian C pada Dinas Perindustrian Kota Sorong telah dapat diimplementasikan, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, peningkatan dukungan anggaran, penyediaan fasilitas operasional, serta penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi langkah penting untuk mewujudkan pengelolaan Galian C yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan Galian C pada Seksi Pengawasan dan Penertiban Dinas Perindustrian Kota Sorong telah berjalan dengan cukup baik. Pengawasan terhadap perusahaan telah dilaksanakan melalui kegiatan pemeriksaan administrasi, pemantauan lapangan, penagihan pajak dan retribusi, serta pembinaan kepada pelaku usaha. Namun, pelaksanaan pengelolaan belum mencapai kondisi optimal karena masih dihadapkan pada berbagai kendala,

antara lain keterbatasan anggaran operasional, minimnya sarana pendukung, keterbatasan personel, serta kondisi geografis yang menyulitkan pelaksanaan pengawasan. Oleh sebab itu, peningkatan dukungan anggaran, penyediaan sarana operasional, penguatan koordinasi, dan peningkatan kapasitas aparatur menjadi faktor penting dalam mendukung optimalisasi pengelolaan Galian C di Dinas Perindustrian Kota Sorong.

B. Solusi Optimalisasi Pengelolaan Galian C

Berdasarkan hasil penelitian, optimalisasi pengelolaan Galian C pada Seksi Pengawasan dan Penertiban Dinas Perindustrian Kota Sorong memerlukan berbagai upaya perbaikan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Solusi tersebut tidak hanya berfokus pada penyelesaian hambatan operasional, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, kepatuhan perusahaan, serta kontribusi sektor Galian C terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya pertama yang perlu dilakukan adalah peningkatan dukungan anggaran operasional. Keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pengawasan lapangan karena memengaruhi frekuensi kegiatan monitoring, biaya transportasi, dan pelaksanaan penertiban. Dengan tersedianya anggaran yang memadai, kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan secara lebih rutin sehingga potensi pelanggaran dapat diminimalkan. Upaya kedua adalah penyediaan sarana dan prasarana operasional yang memadai. Berdasarkan hasil wawancara, kendaraan dinas yang tersedia masih terbatas dan sebagian mengalami kerusakan sehingga petugas sering menggunakan kendaraan pribadi ketika melaksanakan pengawasan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyediakan kendaraan operasional yang sesuai dengan kondisi medan menuju lokasi pertambangan agar mobilitas petugas menjadi lebih efektif. Selain kendaraan operasional, pembangunan pos pengawasan permanen dan penyediaan jembatan timbang juga menjadi kebutuhan penting.

Keberadaan fasilitas tersebut akan mempermudah proses pengawasan terhadap aktivitas pengangkutan material Galian C sekaligus meningkatkan ketertiban administrasi dan akurasi pencatatan hasil produksi perusahaan. Solusi berikutnya adalah memperkuat koordinasi antara Dinas Perindustrian, perusahaan pengelola Galian C, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya. Koordinasi yang baik akan mempermudah pertukaran informasi, mempercepat penyelesaian permasalahan di lapangan, serta meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban administrasi, pembayaran pajak, dan pelaporan hasil produksi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi langkah yang perlu diperhatikan. Aparatur pengawasan memerlukan pelatihan secara berkala mengenai regulasi pertambangan, teknik pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penyusunan laporan hasil pengawasan. Dengan kompetensi yang semakin baik, kualitas pelayanan dan pengawasan akan meningkat sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara lebih optimal. Di samping itu, diperlukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan Galian C. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan, mengukur tingkat keberhasilan program, serta merumuskan langkah perbaikan yang diperlukan. Melalui evaluasi yang berkesinambungan, Dinas Perindustrian dapat melakukan penyempurnaan terhadap sistem pengawasan sesuai dengan perkembangan kondisi di lapangan.

C. Implikasi/ Dampak Penelitian

Hasil penelitian memberikan implikasi secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat konsep optimalisasi yang dikemukakan oleh Michalek, Choudhary, dan Papalambros bahwa pencapaian tujuan organisasi dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam menyeimbangkan tujuan, mengatasi kendala, beradaptasi terhadap perubahan, serta menerapkan kebijakan yang layak dilaksanakan. Temuan penelitian juga mendukung teori manajemen George R. Terry yang menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan dipengaruhi oleh pelaksanaan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan secara terpadu. Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Galian C di Dinas Perindustrian Kota Sorong telah

berjalan sesuai tugas dan fungsi organisasi, namun efektivitasnya masih memerlukan dukungan sumber daya yang memadai. Hasil penelitian dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Sorong dalam merumuskan kebijakan peningkatan anggaran operasional, penyediaan sarana pengawasan, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan koordinasi dengan perusahaan pengelola Galian C. Penelitian ini juga memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang manajemen sektor publik dan pengawasan pemerintahan. Temuan penelitian diharapkan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan pada pemerintah daerah.

Berdasarkan seluruh hasil penelitian, dapat diketahui bahwa optimalisasi pengelolaan Galian C pada Seksi Pengawasan dan Penertiban Dinas Perindustrian Kota Sorong telah dilaksanakan melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan administrasi perusahaan, pemantauan aktivitas pertambangan, pencatatan hasil produksi, penagihan pajak dan retribusi, serta pembinaan kepada perusahaan agar mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Analisis berdasarkan indikator optimalisasi menunjukkan bahwa tujuan organisasi telah berjalan cukup baik, namun belum mencapai kondisi optimal karena masih terdapat berbagai hambatan, seperti keterbatasan anggaran operasional, minimnya kendaraan dinas, belum tersedianya fasilitas pendukung pengawasan, keterbatasan personel, serta kondisi geografis yang menyulitkan pelaksanaan pengawasan. Hambatan tersebut berpengaruh terhadap efektivitas kegiatan monitoring, frekuensi pengawasan lapangan, serta optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Meskipun demikian, aparatur Seksi Pengawasan dan Penertiban tetap menunjukkan komitmen dalam melaksanakan tugas melalui penyesuaian jadwal pengawasan, peningkatan koordinasi dengan perusahaan, serta pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa organisasi memiliki kemampuan beradaptasi terhadap berbagai keterbatasan, meskipun masih memerlukan dukungan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pengelolaan Galian C di Dinas Perindustrian Kota Sorong telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan berbagai perbaikan, terutama pada aspek dukungan anggaran, sarana operasional, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan. Dengan terlaksananya berbagai upaya tersebut, diharapkan pengawasan terhadap kegiatan Galian C menjadi lebih efektif, kepatuhan perusahaan semakin meningkat, dan kontribusi sektor pertambangan terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai optimalisasi pengelolaan Galian C pada Seksi Pengawasan dan Penertiban di Dinas Perindustrian Kota Sorong, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan Galian C telah berjalan dengan cukup baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Pengelolaan dilakukan melalui kegiatan pengawasan lapangan, pemeriksaan dokumen perizinan, pencatatan hasil produksi, pengawasan pengangkutan material, penagihan pajak dan retribusi, serta pembinaan kepada perusahaan agar mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan tersebut memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta terciptanya ketertiban dalam pengelolaan Galian C di Kota Sorong. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan Galian C belum sepenuhnya tercapai. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran operasional, minimnya kendaraan dinas dan sarana pendukung pengawasan, belum tersedianya pos pengawasan permanen dan jembatan timbang, keterlambatan pembayaran pajak dan retribusi oleh perusahaan, serta kondisi geografis yang menyulitkan pelaksanaan pengawasan. Berbagai kendala tersebut berdampak pada belum optimalnya frekuensi pengawasan dan efektivitas pengendalian kegiatan pertambangan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan peningkatan dukungan anggaran

operasional, penyediaan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan instansi terkait. Selain itu, evaluasi pelaksanaan pengawasan secara berkala perlu dilakukan agar setiap kendala dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan pengelolaan Galian C pada Seksi Pengawasan dan Penertiban Dinas Perindustrian Kota Sorong dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kepatuhan perusahaan serta memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan pembangunan daerah. Optimalisasi pengelolaan Galian C pada Seksi Pengawasan dan Penertiban Dinas Perindustrian Kota Sorong telah berjalan cukup baik melalui pelaksanaan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, sarana operasional, kondisi infrastruktur, serta rendahnya kepatuhan sebagian perusahaan terhadap kewajiban pembayaran pajak dan retribusi. Peningkatan anggaran operasional, penyediaan kendaraan pengawasan, penguatan koordinasi antarinstitusi, serta peningkatan pengawasan lapangan merupakan langkah yang diperlukan agar pengelolaan Galian C dapat terlaksana secara lebih optimal dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2017). *Penelitian Kualitatif: Kencana*. Jakarta
- Dwiyanto, A. (2011). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handoko, T. H. (2017). *Manajemen (Edisi 2): BPFE*. Yogyakarta
- Huberman, A. M., Miles, M. B., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Michalek, J. J., Choudhary, R., & Papalambros, P. Y. (2010). *Architecting and Optimizing Product Development Processes*. Cambridge University Press.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi: Salemba Empat*. Jakarta
- Mulyasa, E. (2007). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi: Elex Media Komputindo*. Jakarta
- Poerwadarminta, W. J. S. (2007). *Kamus Umum Bahasa Indonesia: Balai Pustaka*. Jakarta
- Siagian, S. P. (2014). *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D: Alfabeta*. Bandung
- Terry, G. R. (2013). *Prinsip-Prinsip Manajemen: PT Bumi Aksara*. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.